

## MENGEMBANGKAN NASIONALISME KEBANGSAAN MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER

**DRS. NURHARMI, M.Si.**

Dosen Kopertis Wilayah X dpk pada PIPS/PPKn FKIP  
Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat  
E-mail: nurharmi@gmail.com

### ABSTRAK

Penulisan ini berangkat dari masalah nasionalisme dan pendidikan karakter. Hal itu tidak terlepas dari menajerial kepemimpinan dalam sistem politik, kekuasaan dan pemerintahan suatu negara tertentu. Banyak orang membicarakan “manajerial kepemimpinan pendidikan”, tetapi hanya menguraikan manajemen, berbicara gaya pemerintah, memberikan pidato mengenai timbulnya kekacauan. Kekacauan itu tak pernah habis dan berhenti dalam kehidupan manusia. Demokrasi sebagai agenda reformasi sejak tahun 1998 sudah konsensus bangsa dan negara berlandaskan UUD 1945. Hal itu sudah merupakan mendasar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Tetapi pengembangan paradigma sistem politik yang demokratis, di satu pihak memberikan harapan yang mengutamakan aspek *procedure* dari tujuan, di lain pihak membawa eksistensi munculnya krisis multidimensional mencakup krisis ekonomi, kelembagaan, kepemimpinan, krisis kebangsaan, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang merajalela di berbagai level kekuasaan, dan krisis lainnya. Ada anggapan penyebabnya di antaranya dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masyarakat majemuk, baik dari sisi suku, etnis, tempat tinggal yang kesuburan tanahnya, kondisi alamnya yang berbeda. Hal itu mempengaruhi kehidupan ekonomi, karakternya, menajerial kepemimpinan dan lainnya, baik secara individual maupun sosial. Kemudian, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural, plural budaya, adat istiadat, keagamaannya. Kedua itu tidak dapat dikatakan penyebab rawannya konflik sosial, konflik kebangsaan, manusianya ditentukan pula sistem yang dibuat. Lalu jika hal itu dianggap sakit, tidak normal, maka perlu diobati kalau ia memang sudah sakit. Sebab, jika gagal membangun karakter masyarakat yang toleran, demokratis, cinta damai, peduli sosial, bersahabat, serta bertanggung jawab, maka kehancuran sudah menghadang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

**Kata kunci:** nasionalisme, kebangsaan, pendidikan karakter.

### A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang hidup di bumi Nusantara, lahir dalam kesatuan masyarakat adat, mewarisi tradisi, budaya, nilai dan norma-norma keagamaannya. Warisan kesatuan masyarakat

adat berkembang dan maju menjadi kesatuan politik sehingga mampu menjadikan masyarakat berdaulat yang memiliki harkat martabat mulia, terpuji dalam perjuangan leluhurnya. Hal demikian merupakan sejarah yang tidak boleh dilupakan.

Maka dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara adalah cita-cita yang agung dan luhur. Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik [pasal 1 ayat (1) UUD 1945], wujudnya menjalankan pemerintahan Indonesia secara demokrasi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, permusyawaratan/perwakilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berfungsi sebagai sosio-kontrol, penyalur aspirasi rakyat untuk mengatasi jeritan, penderitaan, kekejaman, kekerasan yang merupakan penyebab munculnya konflik, kekerasan yang telah mematikan dan menghancurkan nilai-nilai *human dignity*, *nasionalism*, *character*, kebhinnekaan bangsanya

sendiri. Bung Hatta, sang proklamator, mengungkapkan: “Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Indonesia yang merdeka, yang bersatu, tidak terpecah belah, berdaulat, adil dan makmur, marilah bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita dahulu yang begitu suci, dan mengembalikan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbanan.... Rakyat kita masih tetap miskin, bahkan lebih miskin daripada sebelumnya, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah ruah. Paling baik kita merenungkan keadaan rakyat kita sekarang, yang sungguh-sungguh berhak untuk mendapatkan nasib yang lebih baik, nasib yang sesuai dengan tujuan kita semula” (Mavis Rose, 1991:319).

Bukankah kita harus menyadari secara seksama, kita rakyat, bangsa Indonesia sendiri, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang meliputi daerah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke merupakan simbol, pengakuan kita akan keberagaman, dia merupakan kekuatan, kekayaan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsanya sendiri. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, itulah ia bangsa, negara Indonesia, menjamin

pelaksanaan cita-cita bagi mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman, sentosa, selaras dengan pandangan serta dasar dan sikap hidup rakyat Indonesia.

Di negara Indonesia, arah pengembangan pembelajaran seharusnya tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, tidak boleh juga keluar dari koridor NKRI dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini yang menyebabkan secara terminologi untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) khususnya, di Indonesia digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini seiring dengan mata pelajaran Agama dan Bahasa Indonesia serta mata pelajaran lainnya. Semua itu merupakan bagian dari beberapa mata pelajaran yang harus dan sudah diikuti oleh semua anak bangsa dari persekolahan kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Prosesi dan produk yang diharapkan mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, kesadaran akan norma dan konstitusi

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap NKRI, dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. PPKn dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya dengan jelas pedoman, aturan bagi kehidupan bangsa sejak dahulu, kini dan akan datang sudah ada, akan tetapi mengapa persoalan masalah kebangsaan sepertinya tidak kunjung selesai. Berkaitan dengan persoalan atau permasalahan kebangsaan (*nationalism*) itu dan kaitannya dengan penerapan pendidikan karakter, penulis merumuskannya pada bagian berikut ini.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dan mengemukakan pokok-pokok pikiran berikut: *Pertama*, apa dan bagaimana pemahaman serta pengimplementasian nasionalisme dalam kehidupan berbangsa? *Kedua*, apa dan bagaimana persoalan pelaksanaan pendidikan karakter ke-

bangsaan ke depan? *Ketiga*, apakah melalui kebijakan politik, kedua persoalan yang disebutkan di atas mampu membangun kecerdasan anak bangsa untuk terwujudnya kecerdasan, kesejahteraan, ketertiban yang demokratis?

### C. NASIONALISME SECARA

#### REALISTIS

##### 1. Makna Nasionalisme

Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa kebangsaan yang memiliki kebanggaan, rasa menghargai, menghormati dan loyalitas oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Berkaitan dengan persoalan nasionalisme Indonesia tidaklah muncul secara mendadak, atau tiba-tiba dan turun dari langit. Tetapi ia melalui proses dan sejarah perjuangan yang panjang dan lama, penuh pengorbanan. Persoalan nasionalisme tidak lepas dari persoalan dan konflik lokal, regional serta nasional yang berkembang dan berubah setiap saatnya sesuai dengan perkembangan zaman, baik dilihat dari kemajuan, kekuasaan, politik maupun dari kegiatan sosial lainnya.

Budaya bangsa Indonesia yang sudah mengakar dan sudah menjadi darah daging bangsa sering dilupakan, malahan kerap dijadikan sebagai simbol saja dalam etos perjuangan bangsa menghadapi berbagai masalah, baik yang datang dari luar maupun di dalam negeri. Kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi informasi telah menembus batas keprihatinan negara, sumber referensi sejarah masa lalu mulai ditinggalkan, dan digantikan globalisme. Akibatnya, nilai-nilai budaya sebagai perekat persatuan segenap energi bangsa kian menghilang, kian mengurang pula kepedulian terhadap latar belakang sosial budaya yang ada. Persoalan ini tentu harus disadari bahwa ciri karakter bangsa yang religius, jujur, toleransi dan sebagainya merupakan budaya bangsa, lambang dan simbol karakter bangsa Indonesia yang dibangun dan diimplementasikan dalam segala tindakan, kegiatan dan segala perilaku kehidupan sepanjang nyawa dikandung badan di bumi Indonesia tercinta.

Tegasnya, nasionalisme dapat diartikan sebagai (1) paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa, (2) se-

mangat/perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta terhadap bangsa dan tanah air, dan (3) suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bangsa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu.

Dengan demikian nasionalisme melambungkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, yaitu mengupayakan peningkatan kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat, membanggakan pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan suatu negara, pembelaan kaum patriot dalam melawan pihak asing, memiliki hubungan kepercayaan dengan nilai-nilai tradisi. Lambang nasionalisme diberikan untuk sebuah kesucian, dan penghargaan terhadap penegakkan hukum (*supremacy of law*).

Selanjutnya, nasionalisme secara politis perlu dipahami sebagai kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan, imperialisme atau sebagai pendorong membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya dalam segala kehidupannya, di-

tumbuhkan serta diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dengan memberdayakan nilai-nilai kebangsaan mulai dari nilai budaya adat, lokal sampai pembentukan nilai-nilai kebebasan yakni nilai kebangsaan dan keagamaan yang solider. Warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya lokal tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negaranya. Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan berarti merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Warga negara yang bijak tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang sombong atau berlebihan (*chauvinisme*).

Mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, mengutamakan kerukunan hidup bersama, memiliki rasa kesatuan dan persatuan yang diikat dengan rasa kekeluargaan, kebersamaan, berjuang bersama untuk membangun kesejahteraan yang adil secara jujur, dan memiliki etos kerja baik dengan bangsanya sendiri maupun dengan bangsa-bangsa lainnya. Sesuai dengan pernyataan Ali Moertopo (1978), bahwa manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama melainkan dituntut mencari jalan baru

dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar dan arah yang dimaksud dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri, sehingga humanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan.

Dapat disimpulkan, langkah dan upaya pengembangan nasionalisme (*nation building*) dalam krisis kebangsaan sudah harus dilakukan berbasis kepemimpinan yang humanisme, demokratis dan bijak.

## 2. Nasionalisme dan Pendidikan

### Politik

Pendidikan sebagai sistem pengetahuan dapat mewadahi dalam segala tindakan kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang tidak pernah ada batas akhirnya (*never ending process*), menggelinding perlahan (*evolution*), berjalan datar penuh kehati-hatian (*low profile*), tetapi dalam perjalanannya bukan tidak pernah terjadi *trend*. Difatwakan Imam Al-Ghazali bahwa “persoalan dan solusi sistem pendidikan dan pengajaran versinya, khusus membahas tentang berbagai masalah ilmu pengetahuan, yang intinya tentang ilmu syari’at dan ibadah, masalah *muamalah* antarumat, kemudian mengkaji tentang berbagai

cara pembinaan akhlak yang terpuji dan mengobati akhlak yang tercela.” Dikatakan lagi oleh Al-Ghazali yang dikutip Fathur Rahman dan Syamsudin Asyraf (1986:15-18) bahwa “seseorang yang mempelajari tentang sistem pendidikan dan berbagai aspek atau masalah, seseorang itu harus menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif serta pembatasan yang jelas.” Kemudian dikatakan bahwa “pendidikan akan menjadi tegak dengan jalan menyebarluaskan dan mengajarkan aliran-aliran/ajaran filsafat kepada umat manusia. Sebaliknya, filsafat akan tegak pula lantaran pembatasan tujuan pendidikan dan menetapkan beberapa sarana dan metode yang dapat membantu dalam rangka mencapai tujuan.”

Dari hal itu perlu disadari bahwa solusi, penyelesaian persoalan tantangan nasionalisme dalam konsep PKN sebagai sistem pengetahuan terintegrasi, yakni: (1) Sistem pendidikan diciptakan secara komprehensif. (2) Setiap komponen kajian/pembahasan, pembatasannya harus jelas. (3) Masalah pengetahuan dalam pendidikan harus sejalan dengan pengembangan dan pembinaan nilai, norma hukum dan

akhlak terpuji dan mengobati perilaku yang tercela. (4) Pendidikan menjadi tegak dengan jalan menyebarkan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai, budaya bangsa serta mengajarkan berbagai aliran/ajaran secara filsafat sebagai kebenaran yang rasional kepada umat manusia atau warga negara. (5) Pembatasan tujuan pendidikan antara pengetahuan harus jelas. (6) Filsafat sebagai ilmu untuk menemukan kebenaran akan tegak dengan menetapkan beberapa sarana dan metode untuk membantu tercapainya tujuan itu.

Hal demikian memerlukan transformasi pada setiap lapisan masyarakat dan sesuai pula dengan levelnya, masyarakat persekolahan atau masyarakat penyelenggara politik negara atau pemerintahan. Hal itu terapan dalam kekuasaan negara Indonesia baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan penegakkan hukum (yudikatif) diberi wewenang untuk menjalankan negara Indonesia tercinta.

Dapat disimpulkan, nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dengan tidak menunggu waktu lagi, apalagi mengulur-ulur waktu harus diwujudkan secara realistis.

### **3. Pengembangan Nasionalisme**

#### **Realistis**

Pengetahuan (*knowledge*) kebangsaan, nasionalisme bangsa, pemahaman hak-hak warga, hak-hak asasi manusia, transformasi demokratis Pancasila, hukum, mampu meresapi kemajuan Iptekni yang serba global. Pengakuan keberagaman, hak warga negara, hak asasi manusia yang tidak diskriminatif terintegrasi dalam segala tindakan, aktivitas kehidupan, wujud identitas nasional diimplementasikan sesuai dengan karakter, nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang religius.

Udin S. Winataputra (2008) mengatakan, perlu dipahami secara mendalam dan realistis keadaan bangsa Indonesia dewasa ini secara khusus sudah berubah tetapi belum maju dan memprihatinkan. Hal ini seiring dengan perubahan dan perkembangan dunia saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi komunikasi yang mendunia. Perubahan amat cepat, vulgar, tetapi abu-abu bagi sebagian besar umat manusia Indonesia. Keadaan dan perubahan itu sarat dengan ketidakpastian, memang hanya dalam kehidupan yang pasti itu adalah kematian (Nurharmi, 2012:1). Hal ini

terjadi karena nasionalisme dipahami secara sempit, oleh karenanya menurut Ali Moertopo (1978), sudah harus dilakukan pengembangan dan meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan kebangsaan serta diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.

Pengetahuan kebangsaan dan pengimplementasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diilustrasikan sebagai sejarah perjuangan bangsa masa lalu. Simak ketika dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Konsep bangsa telah mereka kemukakan dengan mengatasnamakan “wakil-wakil bangsa Indonesia”. Nugroho Notosusanto (1971:11) menyatakan, walaupun waktu itu belum jelas benar substansi konsep bangsa Indonesia tersebut, namun kenyataan menunjukkan bahwa proklamasi yang mereka kumandangkan itu didukung oleh segenap golongan masyarakat yang menghendaki kemerdekaan itu, bahkan mereka rela berkorban mempertahankannya. Acuan yang menjadi pegangan kedua proklamator itu adalah: *Pertama*, Sumpah Pemuda tahun 1928 yang mencetuskan adanya konsep satu bangsa yaitu bangsa

Indonesia. *Kedua*, dukungan penuh dari semua golongan yang disepakati dalam pertemuan PPKI tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal dengan pidato lahirnya Pancasila dengan konsep kebangsaan Indonesia. *Ketiga*, kebangsaan Indonesia itu bukan satu golongan di suatu daerah saja seperti Minangkabau, Madura, Yogya atau Sunda atau Bugis tetapi seluruh manusia yang menurut geopolitik tinggal di kesatuan kepulauan Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. Jadi, yang disebutnya wakil-wakil bangsa Indonesia itu adalah wakil-wakil yang tinggal dari ujung Sumatera sampai Irian. Karena itu arti kebangsaan bukan dalam arti sempit tetapi kebangsaan yang meliputi *nationale staat* (negara nasional). Hal demikian menunjukkan konsep kebangsaan Indonesia di dalam negara Indonesia tidaklah dipahami hanya segelintir golongan yang bersifat kedaerahan.

Dengan demikian salah satu solusi untuk mengatasi krisis kebangsaan adalah segala paham perseorangan yang tidak akuntabel harus dihindari, oleh karenanya pendidik dalam pembelajaran kepada peserta didik, kegiatannya betul-betul dikuasai dan mengarah pada pembentukan sikap.

#### 4. Nasionalisme dalam Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran bagi pemahaman jiwa kebangsaan (*nation building*), dikatakan oleh Piaget dan Ausubel, seseorang dapat dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang dapat diamati relatif lama. Perubahan tingkah laku itu tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai akibat dari usaha orang tersebut. Oleh karena itu, proses terjadinya perubahan tingkah laku seperti melalui mata pelajaran PKn atau PPKn di sekolah dasar (SD) mulai kelas awal dan seterusnya.

Dengan kata lain, tanpa adanya usaha tidak disebut belajar sebagai wujud dari pembelajaran. Rukminiati (2003:1.2) mengatakan bahwa menurut teori psikologi stimulus-respon (S-R) dan yang berdasarkan psikologi kognitif, tingkah laku seseorang dikendalikan oleh peristiwa yang berupa ganjaran yang datangnya dari luar dan dinamakan penguatan. Karena adanya stimulus tersebut (faktor-faktor lingkungan), muncul respon (tingkah laku). Stimulus dan respon itu saling berasosiasi. Menurut psikologi S-R, belajar merupakan akibat adanya hubungan

antara peristiwa-peristiwa (S) yang dirangsangkan kepada siswa dan respon (R) siswa terhadap rangsangan tersebut. Dari beberapa aliran psikologi S-R yang ada, aliran yang dianut oleh Thorndike, Skinner, Bruner dan Gagne, di sini para ahli psikologi kognitif berpendapat bahwa pengetahuan merupakan konstruksi kognitif dari suatu kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seseorang. Dengan demikian belajar bukan sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini menegaskan pula bahwa kemampuan individu terbangun melalui proses interaksi yang terus menerus dan menyeluruh antara individu dan lingkungannya.

Dapat disimpulkan, nilai-nilai kebangsaan dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada dalam kehidupan, lingkungan masyarakat atau bangsa itu sendiri dan melalui institusi, kelembagaan apapun dapat dilakukan. Tinggal lagi mau atau tidak maunya diwujudkan anggota masyarakat, pemimpin bangsa yang ada dalam negara Indonesia yang berdaulat ini.

---

---

## D. PENDIDIKAN KARAKTER

### 1. Pemahaman Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi *insan kamil*. Menurut Philips (dalam Masnur Muslich, 2011:70), “karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan”. Selanjutnya ditegaskan oleh Saptono (2011:23) bahwa “Pendidikan karakter dalam upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (*good character*) berdasarkan kebajikan-kebajikan inti (*core virtues*) yang secara objektif baik untuk individu maupun masyarakat”.

Pendidikan karakter di Indonesia yang dilaksanakan melalui proses pendidikan di segala level, tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi baik secara formal, informal maupun non-formal, harusnya mampu menjawab permasalahan konflik, krisis kebang-

saan seperti di Indonesia. Kurikulum di persekolahan Indonesia mengindikasikan bahwa amanat atau kurikulum persekolahan di Indonesia sebagai salah satu unsur yang memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya potensi peserta didik. Kurikulum 2013 yang dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kemudian secara tegas pada Kurikulum 2013 menekankan dimensi pedagogik modern, yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik) dengan 5M: mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba (*experimenting*), menalar (*associating*), dan membentuk jejaring (*networking*). Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosio-

kultural. Karena itu inti dari pendidikan termasuk PPKn adalah belajar atau *learning*. Dalam konteks pendidikan formal dan nonformal, proses belajar merupakan misi utama dari proses pembelajaran atau *instruction*. Secara normatif, dalam pasal 1 butir 20 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dirumuskan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar”.

Secara filosofi dan substantif pedagogis/andragogis, mata pelajaran PPKn yang merupakan salah satu bagian implementasi pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, berkeadilan serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-bhinneka tunggal ika (Udin S. Winataputra, 2012:141). Secara historis kontemporer, multikulturalisme setidaknya menunjuk pada tiga hal: (1) sebagai bagian dari *pragmatism movement*; (2) sebagai *political and cultural pluralism*; (3) sebagai *official national policy*.

Jelaslah bahwa pendidikan karakter merupakan upaya bagi pengemba-

ngan nilai-nilai kebangsaan di negara Indonesia melalui pendidikan di persekolahan dan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga informal atau non-formal lainnya.

## 2. Kandungan Nilai Kebangsaan

Terkait pendidikan karakter, setidaknya ada 18 nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kemendiknas, 2010:32). Selanjutnya, karakter itu perlu dikembangkan oleh guru di lingkungan sekolah pada peserta didik di antaranya adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Kasus sebagaimana diungkapkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) (dalam Prayoga Bestari dan Syaifullah Syam, 2010:3), bahwa ada sembilan krisis yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini, yaitu: “Krisis identitas, krisis ideologi, krisis kepercayaan, krisis semangat kebangsaan, krisis semangat sistem politik, krisis manajemen negara, krisis kesejahteraan

rakyat, krisis kedaulatan ekonomi, dan krisis lingkungan.” *Media Indonesia* (18 Mei 2010) mengungkapkan, “Lemahnya dan kurangnya karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan, kita lihat dengan munculnya banyak kasus-kasus dan permasalahan yang timbul baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, dan pemerintahan. Seperti yang baru-baru ini terjadi kasus korupsi sebutlah kasus Aqil Mochtar yang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), kasus korupsi pemerintahan Banten TB Chaeri Wardana, kasus Ratu Atut dan banyak lagi kasus-kasus yang tidak mengemban nilai-nilai Pancasila, sebagai karakter dan budaya bangsa yang berpegang pada tatanan nilainya sendiri.” Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya nilai karakter kejujuran, cinta tanah air, dan tanggung jawab.

Kemudian, kasus tawuran antarwarga di Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Agustus 2013. *Koran Tempo* (28 Agustus 2013) mengungkapkan, perang antarkampung di Bima terjadi, yang mengakibatkan tiga orang mengalami luka tembak, dipicu oleh pertengkaran antara dua pemuda desa. Hal ini juga menunjukkan kurangnya karakter yang ditunjukkan masyarakat seperti

nilai karakter toleransi, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, dan peduli sosial.

Kemudian sering terjadi kasus tawuran antarpelajar. Hal tersebut misalnya kasus tawuran antara siswa SMA 70 dan SMA 6 Jakarta (yang kemudian disidangkan), menewaskan salah seorang siswa. Dalam hal ini guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat memiliki peran dalam pengembangan karakter bangsa agar menciptakan peserta didik yang memiliki karakter baik (*good character*) melalui pendidikan formal di sekolah.

Selanjutnya ditegaskan Lickona (dalam Prayoga Bestari dan Syaifullah Syam, 2010:2), ada beberapa karakter yang harus diwaspadai; jika karakter itu ada, maka itu berarti suatu bangsa sedang menuju kehancuran, yaitu: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan, (4) meningkatnya perilaku yang merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) semakin menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa

hormat kepada orangtua dan guru, (8) semakin rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian antara sesama umat manusia, sesama warga yang berada di bumi Nusantara yang menganut konsep Bhinneka Tunggal Ika, kita boleh berbeda, akan tetapi dalam kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan nasional.

Selanjutnya, Lawrence E. Shapiro (2003:23-26) menyatakan bahwa “pembentukan karakter sesuai dengan kecerdasan anak yang disebutnya *intelligence quistion* atau IQ dan *emotional quistion* atau EQ orangtua yang tinggi, menyarankan dalam praktis pembelajaran agar mengajarkan pada anak melalui pembinaan hubungan persahabatan; bekerja dalam kelompok; berbicara dan mendengarkan secara efektif; mencapai prestasi lebih tinggi; mengatasi masalah dengan teman yang nakal; berempati pada sesama; memecahkan masalah; mengatasi konflik; membangkitkan rasa humor; memotivasi diri bila menghadapi saat-saat sulit; menghadapi

situasi sulit dengan percaya diri; menjalin keakraban; memanfaatkan komputer untuk meningkatkan keterampilan emosi”.

Hal-hal yang disebutkan di atas akan lebih baik dilengkapi permainan, tabel, teknik, sehingga mengajarkan *emotional intelligence* akan membantu pada anak mengatasi stres emosi yang diakibatkan kehidupan modern dan masalah-masalah yang lazim terjadi pada usia perkembangan anak. Artinya, pendidik dituntut mengajar dan mendidik secara arif dan bijaksana.

### 3. Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Persoalan berupa perilaku masyarakat yang masih belum sejalan dengan karakter bangsa, dengan filosofis bangsa yakni nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, keadilan yang diamanatkan oleh falsafah Pancasila: religius, humanis, nasionalis, demokratis, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jika permasalahan ini dibiarkan, dapat menimbulkan ancaman pada eksistensi bangsa. Karena itu diperlukan pendidikan karakter yang berfungsi untuk: (1) mengembangkan potensi dasar berhati, berpikiran dan berperilaku baik, (2) memperbaiki perilaku yang kurang baik dan menguatkan perilaku yang sudah

baik, (3) menyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Ada delapan belas nilai karakter yang perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan masyarakat baik lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat umum secara umum. Untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah, kedelapan belas nilai karakter tersebut perlu diseleksi sesuai dengan visi sekolah untuk menjadikan nilai utama dan nilai pendukung, diimplementasikan dengan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Akan tetapi dalam masyarakat umum direalisasikan secara realistis.

Kendala yang cenderung dihadapi dalam implementasinya berupa: *Pertama*, sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visinya, pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh, guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, guru belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada mata pelajaran yang diampunya, dan guru belum dapat

menjadi teladan atas nilai-nilai karakter yang dipilihnya.

*Kedua*, pada waktu masyarakat sekolah sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat yang beraktivitas dalam berbagai hal, mengabdikan dalam segala bentuk kegiatan sosial, politik baik sebagai elite politik atau menjadi rakyat biasa yang tidak diiringi pendidikan moral, budi pekerti, maka cenderung menafikan rasa kesatuan dan nasionalisme yang muram untuk masa depan bangsa.

Saat ini penulis pinjam sebuah ilustrasi yang dikemukakan Nurul Zuriyah (2007), pada sebuah museum di Konstantinopel terdapat koleksi benda kuno berupa lempengan tanah liat berasal dari tahun 3800 SM, yang bertuliskan: "*We haven't fallen upon evil times and the world has waxed very old and wicked politics are corrupt. Children are no longer respectful to their parents.*" Makna yang terkandung dalam tulisan tersebut, "Kita telah mengalami zaman edan dan dunia telah diliputi kemiskinan dan kejahatan. Politik sangat korupsi. Anak-anak sama sekali tidak hormat kepada orangtuanya." Selanjutnya ia katakan, kalau kita runtu dari sejarahnya, masalah

peradaban, budi pekerti telah lama menjadi masalah hidup manusia seperti tercemin pada lempengan tanah liat tersebut, yang menurut beberapa pakar sejarah berasal dari zaman Babilonia, namun demikian tidak dijelaskan secara rinci faktor penyebabnya. Dengan memperhatikan aspek politik yang disebut-sebut itu menunjukkan bahwa dengan aspek sistem pemerintahan negara kurang baik sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya.

Jelaslah bahwa pengimplementasian pendidikan karakter merupakan satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagai pelaksana dalam pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan.

#### **4. Pendidikan Karakter Berbasis**

##### **Nasionalisme**

Akankah keberadaan PKn di persekolahan merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek politik, bukankah dia melekat pada sistem pemerintahan RI yang menyebabkan beban kesengsaraan, beban yang harus dipikul oleh masyarakat dan rakyatnya. Di persekolahan, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, PKn merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan

kepribadian warga, masyarakat, bangsa dan negaranya sendiri. Hal ini di-realisasikan melalui kesadaran pendidikan Pendidikan Kewargaan sebagai wahana umum serta esensi pendidikan demokratisasi Indonesia, yang merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia dilaksanakan. Dikatakan Udin S. Winataputra (2008) bahwa melalui (1) *civic intelligence*, yakni kecerdasan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial, (2) *civic responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan (3) *civic participation*, yakni kemampuan berpartisipasi dalam kewargaannya sebagai warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial sebagai pemimpin hari depan, serta mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, Pendidikan Kewargaan atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar dengan hubungan antar-

warga negara. Dinyatakan dalam amanat Depdiknas (2006:271), PKn di persekolahan bertujuan: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia, (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Dua pernyataan di atas menunjukkan bahwa PKn merupakan aspek pendidikan politik yang fokus pada peran warga negara dalam kehidupan bernegara yang semua itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan, tuntutan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang handal.

Kemudian nilai budaya tersebut akan menjadi perekat baik sebagai gerakan *nation building* maupun sebagai *state building* lambang nasionalisme Indonesia dalam menghadapi berbagai tafsir keragaman yang berasal dari luar pemerintah. Termasuk keberadaan nilai-

nilai kearifan lokal dieliminir demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif. Konsekuensinya, kesatuan-persatuan terlihat lebih menonjol demi membangun harmoni politik dan kesinambungan pemerintahan, nilai-nilai budaya lokal, searif apapun diperlakukan secara lebih kritis, dan kemudian dimarjinalkan.

Atas dasar kenyataan itu, maka perlu pemikiran ulang kontekstualisasi nasionalisme Indonesia dan nilai-nilai kearifan lokal. Pemikiran ini bisa ditindaklanjuti melalui pembangunan karakter berbasis nilai-nilai budaya daerah. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber daya untuk menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi seluruh bangsa, agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

### **5. Strategi Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter mulai dari persekolahan tingkat rendah sampai tingkat perguruan tinggi sudah diberikan secara optimal, dan berusaha membantu peserta didik dalam perkembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, agama, keluarga

serta perencanaan dan perkembangan karir. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi *insan kamil*. Menurut Philips (dalam Masnur Muslich, 2011:70), “karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan”.

Lemahnya gerakan dan aksi karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan, kita lihat cenderung munculnya banyak kasus dan permasalahan yang timbul baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dalam pemerintahan Indonesia, memudarnya karakter, apalagi tidak seiring dengan kekuasaan politik pemerintahan.

Upaya dan strategi yang bijak mengatasi tantangan dan persoalan karakter bangsa yang dalam arus reformasi kemarin umpamanya, simak pernyataan Tomas Lickona (dalam Ratna Megawangi, 2004) bahwa terdapat sepuluh karakteristik zaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada, maka itu berarti suatu bangsa sedang menuju kehancuran. Kesepuluh karakter tersebut adalah: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) penggunaan kata-kata, bahasa yang memburuk; (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan sek bebas; (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; (6) semakin menurunnya etos kerja; (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada guru dan orangtua; (8) semakin rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara; (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Bedasarkan pernyataan di atas, fakta-fakta kehidupan sosial menunjukkan apa yang disampaikan Thomas Lickoma telah tampak dalam kehidupan

bangsa Indonesia saat ini, dengan adanya krisis ekonomi dan krisis moral yang terindikasi dengan banyaknya tindakan kekerasan, gaya hidup hedonis, menjalarnya praktik KKN dan lemahnya penegakkan hukum, seolah telah membaliknya citra bangsa. Selanjutnya, dinyatakan oleh Abdul Aziz Wahab (2009) bahwa “Keterpurukan bangsa saat ini adalah karena kita telah menghilangkan jati diri bangsa yang dengan itu pada masa lalu bangsa kita amat disegani dan dihormati terutama di kawasan ini. Jati diri bangsa yang digambarkan sebagai kepribadian bangsa itu adalah pengamalan nilai-nilai moral dan bernegara.”

Berdasarkan krisis karakter, tatanan nilai yang terpuruk seperti disebutkan di atas, solusi untuk mengatasinya adalah dibutuhkan upaya pemahaman baru kebangsaan dan merajut kembali ke-Indonesia-an (*nation building*), jiwa kebangsaan yang integritas dan menonjolkan identitas bangsanya sendiri. Hal itu akan meniti jalan memahami dan memanasikan semangat (*support*) cita rasa kebangsaan, untuk memantapkan kembali karakter dan jati diri bangsa di semua lini kehidupan masyarakat, baik mereka sebagai peserta didik

(siswa, mahasiswa) maupun sebagai elite-elite politik dalam praktik dan pembuatan kebijakan. Kebijakan dan usaha sebagai upaya membentuk karakter yang baik, menurut Ratna Megawangi (2004), bukanlah pekerjaan mudah, memerlukan pendekatan komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis dan berkesinambungan yang dimulai dari kecil di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, selain di lingkungan masyarakat (*community civic*) sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam rangka menciptakan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Pandangan tersebut dipertegas oleh Wynne (dalam Sauri, 2010), bahwa “Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani “*charassian*” yang berarti *to mark* (menandai atau mengukit).” Secara istilah, terdapat dua pengertian. *Pertama*, berkarakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, maka orang tersebut memanipulasikan karakter jelek. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, maka orang tersebut memanipulasikan karakter

ter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan *personality*, seseorang disebut berkarakter kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Dapat ditegaskan, tantangan dan solusi permasalahan karakteristik pembelajaran PKn dapat diatasi dengan berbagai pengembangan nilai-nilai bangsa. Kemudian, perkuat pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), tingkatkan rasa dan perasaan moral (*moral feeling*), kembangkan perilaku moral (*moral feeling*), dan kembangkan di persekolahan (*character behavior*). Karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, mencintai atau menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan.

## E. PENUTUP

Melemahnya dan hancurnya bangsa karena lemahnya karakter bangsa. Namun, bangsa yang besar adalah masyarakatnya yang bermartabat, yang pasti tidak akan membiarkan dirinya lemah dan tidak tergoyahkan oleh goncangan global. Hal positif ini bisa terjadi selama pendidikan karakter bangsa dilakukan penuh keyakinan. Oleh karenanya nasionalisme perlu digerakkan (*action*) seiring dengan gerakan *nation building* dan *state building*

malalui aksi, kekuasaan politik yang bijak, dan terus menerus.

Pendidikan karakter, sebagai soko dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terintegrasi pada nilai-nilai karakter. Pembelajaran PKn ataupun PPKn perlu dikembangkan dan mengambil peran penting dan strategis terhadap pembangunan bangsa baik *nations building* itu sendiri maupun *spritual support*, yang perlu pula mengimplementasikan prinsip dan *asas karakteristik* kebangsaan dalam segala aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Bestari, Prayoga dan Syaifullah Syam. 2010. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa (Nation and Character Building): Refleksi, Komitmen dan Prospek*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Budi, Handoyo. 2012. "Kendala-kendala Implementasi Pendidikan Karakter." Tersedia di <http://www.handoyo>. Diakses 3 Oktober 2015.
- Castles, Lance. 1996. "Nasionalisme Kontemporer dan Relevansi bagi

- Indonesia.” Makalah Seminar Program Ketahanan Nasional Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 27-28 November 1996.
- Depdiknas. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas.
- Jabar, Abdul. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Karakter*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Kemendikbud. 2013. *Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013. *Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2014. *Materi Pelatihan Guru PPKn: Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Kong and Springer. *Curriculum in Asia and the Pacific*. Hong Kong: CERC The University Hong.
- Kotter, John P. 1999. *On What Leaders Really Do (Kepemimpinan dan Perubahan)*. Jakarta: Erlangga.
- LP3ES. 2001. *Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial: Karya Lengkap Bung Hatta Buku 3*. Cetakan I. Jakarta: LP3ES.
- Masoed, Mohtar. 1996. “Pokok-pokok Pikiran Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini.” Makalah Seminar Program Ketahanan Nasional Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 27-28 November 1996.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Terbentuknya Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Gramedia.
- Moertopo, Ali. 1978. *Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pantjasila yang Otentik*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI.
- Nurharmi. 2012. “Strategi dan Kiat Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik Kebangsaan.” Makalah Seminar Nasional, Auditorium Pascasarjana UPI Lt V, Jl. Setiabudhi No. 229 Bandung, 30-31 Maret 2012.
- Rahman, Fathur dan Syamsudin Asyrafi. 1986. *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali*. Bandung: Al Ma’arif.
- Rose, Mavis. 1991. *A Politic Biography of Muhammad Hatta*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Rose, Mavis. 2007. *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Muhammad Hatta*. Alih Bahasa Hermawan Sulistyio. Jakarta: Gramedia.
- Rukminiati. 2007. *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Jakarta: Dirjen Dikti Diknas.
- Saptono. 2011. *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi dan Langkah Praktis*. Jakarta: Erlangga.
- Shapiro, Lawrence E. 2003. *Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sumatmadja, Nursid dan Wihardit Kuswara. 2009. *Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Takriyanti, Rizky. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Jambi: IAIN STS Jambi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul Aziz. 2009. "Memantapkan Jati Diri Bangsa dalam Rangka Pergaulan Dasar-dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia." Makalah Seminar Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, tanggal 12 Desember 2009.
- Winataputra, Udin S. 2008. "Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif PKn sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia." Dalam *Acta Civicus*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI, Volume 2, No. 1 Oktober 2008, Bandung.

shz